

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

Dunia Arab telah menyaksikan perubahan besar dalam peta politiknya selama dekade terakhir (2010-2020), karena revolusi Musim Semi Arab membawa perubahan besar pada rezim beberapa negara Arab seperti Mesir, Tunisia, Libya, Sudan dan Aljazair, sementara reformasi politik dan amandemen sistem pemerintahan terjadi di beberapa negara lain, seperti Maroko, Yaman dan lainnya, sedangkan revolusi Suriah berubah menjadi perang saudara yang terus berlanjut hingga sekarang. Revolusi dipandang sebagai fenomena sosial yang dilakukan oleh suatu partai atau kelompok yang tujuannya adalah perubahan sesuai dengan ideologi partai atau kelompok tersebut, dan tidak terkait dengan legitimasi hukum, serta mengekspresikan transfer kekuasaan dari kelas penguasa ke kelas revolusioner<sup>(1)</sup>.

Namun, terlihat dalam revolusi Musim Semi Arab bahwa itu adalah gerakan massa yang spontan dan tidak direncanakan, yang dimulai dengan membakar Mohamed Bouazizi di lingkungan Sidi Bouzid di Tunisia, kemudian menyebar ke seluruh Tunisia karena kemarahan rakyat atas bunuh diri Bouazizi, kemudian menyebar ke beberapa negara tetangga dalam apa

---

<sup>(1)</sup>Marwa Tohamy, (2013), Partisipasi politik perempuan dalam revolusi 2011 di Mesir dan Libya, studi lapangan antropologis komparatif, Institut Penelitian dan Studi Afrika, Universitas Kairo, hlm. (7).

yang disebut penularan revolusi. Revolusi Tunisia dipandang sebagai inspirator gelombang protes bagi revolusi Musim Semi Arab. Menurut Ahmad Jamaludin, Revolusi Melati menjadi inspirator gelombang protes dalam Arab Spring. Gerakan protes dalam Arab Spring diinisiasi oleh masyarakat biasa dengan mengandalkan aksi massa untuk melawan rezim yang telah berkuasa sejak lama<sup>(2)</sup>.

Revolusi Tunisia membawa perubahan penting di tataran politik di Timur Tengah, terutama di negara-negara Arab, juga membawa perubahan penting di tataran sosial dan intelektual di antara gerakan masyarakat, dan menguatnya keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Ini menjadi jelas bagi kita dengan melihat jumlah partai politik yang sebenarnya sebelum dan sesudah revolusi. Sementara jumlah partai Tunisia sebelum revolusi hanya 8 partai, sedangkan partai Rally Demokrat Konstitusi yang berkuasa mendominasi politik di Tunisia, jumlah partai-partai Tunisia setelah revolusi mencapai 224 partai, menurut pernyataan Kementerian Hak Asasi Manusia dan hubungannya dengan badan konstitusional dan masyarakat sipil Pada 29 Juni 2020<sup>(3)</sup>.

---

<sup>(2)</sup>Ahmad Jamaludin. (2019), Revolusi melati di Tunisia: Peluang politik, framing, dan struktur mobilisasi, UIN Sunan Kalijaga., hlm. (3).

<sup>(3)</sup> Seperti yang dapat diakses pada situs <https://2u.pw/SAI7x>, diakses pada tanggal 8 May 2022.

Media sosial telah berkontribusi pada koordinasi dan perluasan gerakan protes, sementara media resmi mengabaikan peliputan acara dan mempromosikan keberadaan konspirasi asing. Selama itu media sosial adalah satu-satunya cara untuk mentransmisikan acara, memobilisasi dan mengkoordinasikan protes, dan berkomunikasi di antara anak muda.

Revolusi Tunisia berhasil mencapai tuntutan yang paling penting, yaitu penggulingan rezim, dan peletakan dasar sistem demokrasi baru yang didasarkan pada pencapaian nilai-nilai kebebasan, keadilan dan kesetaraan di antara semua kelas rakyat, dan mencapai kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam hak, kebebasan, dan martabat manusia.

## **II.1 Teori Demokrasi:**

Kata Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu: (demos) yang berarti rakyat dan kata (Kratia) yang berarti pemerintahan, jadi kata itu artinya; (kekuasaan rakyat).<sup>(4)</sup> Meskipun negara Yunani kuno adalah yang menghadirkan istilah dan konsep demokrasi kepada zaman modern, tetapi tidak menghadirkan model penerapannya yang jelas secara proporsional dengan zaman modern, karena itu definisi-definisi yang berhubungan dengan konsep demokrasi bervariasi. Demokrasi dalam konsep liberal adalah: Sistem pemerintahan di mana rakyat berpartisipasi melalui perwakilan atau melalui referendum, pemungutan suara atau pengakuan populer, dan biasanya dikenal

---

<sup>(4)</sup> Wilson, N. G. (2006). *Encyclopedia of ancient Greece*. New York: Routledge. hlm. (51)

sebagai "demokrasi perwakilan", sehingga aturan yang sebenarnya terbatas pada tangan kelas terbatas, yaitu pemerintah, karena ketidakmungkinan partisipasi seluruh rakyat dalam mengelola urusan negara.

Adapun pemikiran Markis, demokrasi dicapai ketika kelas pekerja membebaskan diri dari eksploitasi kelas kapitalis, dan kekuatan politik pada saat itu mengasumsikan pembentukan pemerintahan demokratis yang mewakili kepentingan sebagian besar kelas pekerja<sup>(5)</sup>.

Demikianlah, kita menemukan kedua definisi yang sama dalam pembebasan rakyat dari eksploitasi penguasa, dan untuk memerintah diri sendiri atau memilih wakil mereka untuk melakukannya. Konsep ini adalah salah satu tuntutan utama yang dibuat oleh revolusi Tunisia dan setelah semua revolusi Arab yang dikenal dengan istilah "Arab Spring".

### **II.1.1 Gelombang Demokrasi:**

Gelombang demokrasi merupakan mengacu pada gelombang besar demokrasi yang pernah terjadi dalam sejarah. Istilah ini muncul pada tahun 1987, dipopulerkan oleh ilmuwan politik Harvard Samuel Huntington dalam artikelnya yang diterbitkan dalam *Journal of Democracy* dan dijelaskan secara luas dalam bukunya "*The Third Wave Democratic Transition in the Late Twentieth Century*".

---

<sup>(5)</sup>Dr. Al-Moussawi, Hamid. Visi pemikiran politik, liberal dan sosialis untuk demokrasi, *Jurnal Politik Internasional*. hlm. (323)

Menurut Huntington<sup>(6)</sup> gelombang demokrasi itu adalah: "sekelompok transisi dari rezim non-demokratis ke rezim demokratis yang terjadi dalam periode waktu tertentu dan jauh melebihi jumlah pergeseran ke arah yang berlawanan selama periode waktu tersebut".

Sarjana lain mendefinisikan gelombang demokrasi sebagai "serangkaian upaya atau proses transisi demokrasi yang berhasil, ditambah dengan hubungan antar transisi dalam kelompok tersebut"<sup>(7)</sup>. Gelombang demokratisasi telah dikaitkan dengan pergeseran tiba-tiba dalam distribusi kekuasaan di antara negara-negara besar, menciptakan peluang dan insentif untuk reformasi domestik yang komprehensif. Para ahli politik memperdebatkan jumlah pasti gelombang demokrasi. Huntington menggambarkan tiga gelombang: gelombang "lambat" pertama pada abad kesembilan belas, gelombang kedua setelah Perang Dunia II, dan gelombang ketiga yang dimulai pada pertengahan 1970-an di Eropa selatan, kemudian Amerika Latin dan Asia. Meskipun bukunya tidak membahas keruntuhan blok Soviet, sejumlah sarjana telah mempertimbangkan "gelombang ketiga" untuk memasukkan transisi demokrasi 1989-1991. Sarjana lain, seperti Siva Gnitsky dari Universitas Toronto, telah menunjukkan bahwa jumlah gelombang mencapai tiga belas dari abad kedelapan belas ke Musim Semi Arab (2011-2012)<sup>(8)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> Huntington, (1991) "*Democracy's Third Wave*", hlm. (15)

<sup>(7)</sup> Gnitsky, Seva (2018). "*Democratic Waves in Historical Perspective*". *Perspectives on Politics*, hlm. (634).

<sup>(8)</sup> *Ibid*, hlm. (641).

### **II.1.2 Gelombang Demokrasi Pertama:**

Menurut Huntington, gelombang demokrasi pertama, 1828-1926, dimulai pada awal abad kesembilan belas ketika hak pilih diberikan kepada mayoritas laki-laki kulit putih di Amerika Serikat. Prancis, Inggris, Kanada, Australia, Italia, Argentina, dan beberapa negara lain menyusul sebelum tahun 1900. Pada puncaknya, setelah pembubaran kekaisaran Rusia, Jerman, Austria, dan Ottoman pada tahun 1918, gelombang pertama menyaksikan 29 negara demokrasi di dunia. Kemunduran dimulai pada tahun 1922, ketika Benito Mussolini berkuasa di Italia. Keruntuhan terutama mempengaruhi demokrasi yang baru terbentuk, yang tidak tahan dengan kebangkitan agresif gerakan otoriter atau gerakan totaliter komunis, fasis, dan militeristik ekspansionis yang secara sistematis menolak demokrasi. Gelombang pertama mencapai titik terendah pada tahun 1942, ketika jumlah demokrasi di dunia turun menjadi hanya 12 negara.<sup>(9)</sup>

### **II.1.3 Gelombang Demokrasi Kedua:**

Gelombang kedua dimulai setelah kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II, dan mencapai puncaknya hampir 20 tahun kemudian pada tahun 1962 dengan 36 negara demokrasi yang diakui dunia. Gelombang kedua juga mereda pada titik ini, dengan jumlah total turun menjadi 30 negara demokrasi antara tahun 1962 dan pertengahan 1970-an. Tapi "garis lurus" itu tidak bertahan lama, gelombang ketiga akan menyerbu masuk dengan cara yang belum pernah dilihat

---

<sup>(9)</sup> Huntington, (1991) "*Democracy's Third Wave*", hlm. (17-18).

siapa pun sebelumnya. Beberapa peneliti telah mencatat bahwa munculnya "gelombang" demokrasi sebagian besar menghilang ketika hak pilih perempuan dipertimbangkan. Selain itu, sikap beberapa negara telah berubah secara dramatis. Swiss, yang termasuk dalam gelombang pertama, tidak memberikan hak pilih kepada perempuan sampai tahun 1971<sup>(10)</sup>.

#### **II.1.4 Gelombang Demokrasi Ketiga:**

Gelombang ketiga dimulai dengan Revolusi Portugis tahun 1974 dan transisi Spanyol menuju demokrasi pada akhir 1970-an, dan dengan sejarah transisi demokrasi di Amerika Latin pada 1980-an, negara-negara Asia-Pasifik (Filipina dan Korea Selatan) dari 1986 hingga 1988, dan Eropa Timur setelah runtuhnya Uni Soviet, dan Afrika sub-Sahara mulai tahun 1989. Perluasan demokrasi di beberapa wilayah sangat mengejutkan. Kolombia, Kosta Rika, dan Venezuela di Amerika Latin semuanya adalah negara demokrasi pada tahun 1978, dan hanya Kuba dan Haiti yang tetap otoriter pada tahun 1995, ketika gelombang itu melanda dua puluh negara. Huntington mencatat bahwa tiga perempat dari negara demokrasi baru adalah Katolik Roma<sup>(11)</sup>.

Kebanyakan negara Protestan sudah demokratis. Dia menekankan Konsili Vatikan tahun 1962, yang mengubah Gereja dari pembela orde lama menjadi penentang otoritarianisme. Terkadang negara-negara yang sedang atau telah

---

<sup>(10)</sup> Paxton, Pamela. (2000). *"Women's Suffrage in the Measurement of Democracy: Problems of Operationalization."* Studies in Comparative International Development, hlm (111).

<sup>(11)</sup> Huntington, (1991) *"Democracy's Third Wave"*, hlm. (13).

melalui tahap transisi demokrasi selama gelombang mengalami penurunan demokrasi. Ilmuwan politik dan ahli teori percaya bahwa gelombang ketiga telah mencapai klimaksnya dan akan segera mulai surut, seperti yang dilakukan pendahulunya pada gelombang pertama dan kedua. Negara-negara gelombang ketiga, termasuk Portugal, Spanyol, dan Korea Selatan, menjadi negara demokrasi yang mapan dan bukannya memburuk. Pada tahun 2020, mereka memiliki demokrasi yang lebih kuat daripada banyak rekan mereka dengan sejarah yang kaya sebagai negara demokrasi<sup>(12)</sup>.

#### **II.1.5 Musim Semi Arab:**

Dari uraian di atas, jelas bagi kita bahwa dunia Arab tidak terpengaruh oleh salah satu dari tiga gelombang demokrasi, terutama ketika Uni Soviet runtuh dan demokrasi menyapu seluruh Eropa sosialis dengan kecepatan luar biasa, dan inilah yang disebut Samuel Huntington sebagai kelanjutan dari gelombang ketiga demokrasi yang dimulai pada akhir tahun tujuh puluhan dan berlanjut hingga akhir abad kedua puluh.

Namun, hanya beberapa negara seperti Yordania dan Maroko yang terkena dampak gelombang ketiga demokrasi di negara-negara Arab, ketika pemilihan parlemen dilanjutkan dan partai politik diizinkan beroperasi secara terbuka. Namun, mayoritas negara Arab mampu melewati tahap itu tanpa kesulitan dan tanpa reformasi. Tetapi tampaknya revolusi kerakyatan yang terjadi di Tunisia,

---

<sup>(12)</sup> Democracy Index 2020.



dan revolusi-revolusi yang mengikutinya, termasuk Mesir, Suriah, Libya, Yaman, dan negara-negara lain, merupakan indikasi munculnya apa yang bisa disebut sebagai “gelombang keempat” demokrasi<sup>(13)</sup>, yang akan menjadi keunggulan Arab, yang berarti bahwa hal itu dapat meluas dan memiliki dampak di masa depan<sup>(14)</sup>.

Gelombang ini dicirikan oleh seperangkat karakteristik yang mirip dengan apa yang terjadi pada gelombang demokrasi sebelumnya di tingkat global yaitu:

- i. Pertama: bahwa gerakan-gerakan ini dimulai secara spontan, dan tidak terorganisir, dan mencakup sektor-sektor besar dari kelompok-kelompok populer, tetapi mereka dipimpin oleh para pemuda pengangguran, yang frustrasi secara politik dan sosial.
- ii. Kedua: Gerakan-gerakan sosial ini tidak dilakukan oleh partai-partai politik oposisi dan institusi-institusi beludru dari masyarakat sipil, melainkan muncul dari massa, dan partai-partai oposisi dikejutkan oleh mereka seperti halnya pemerintahan diktator.
- iii. Ketiga: Gelombang ini, seperti gelombang demokrasi lainnya, bukanlah peristiwa sementara, melainkan proses panjang yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun hingga selesai dan matang serta membentuk demokrasi yang matang dan kokoh di mana stabilitas politik berlaku. Juga,

---

<sup>(13)</sup> Menurut bapak Presiden Tunisia Ke-empat Dr. Moncef Marzouki dalam wawancara yang dilakukan dengannya oleh peneliti pada 17 Juni-2022 di Istanbul.

<sup>(14)</sup>Abushouk, Ahmed. (2016), *The Arab Spring: A Fourth Wave of Democratization*, *Qatar University Press*. hlm (59-71).

gelombang demokrasi biasanya terjadi di tingkat wilayah tertentu dan bukan merupakan fenomena yang terisolasi di negara tertentu, dan inilah yang terjadi setelah runtuhnya Uni Soviet dan runtuhnya kediktatoran Marcos di Filipina dan berakhirnya pemerintahan kediktatoran di Amerika Latin. Memang benar bahwa negara-negara Arab memiliki kondisi ekonomi dan politik yang berbeda-beda, tetapi tidak satu pun dari negara-negara ini akan kebal dari transformasi ini<sup>(15)</sup>.

## **II.2 Revolusi Tunisia 2011:**

### **II.2.1 Definisi konsep revolusi:**

Istilah revolusi merupakan salah satu istilah luas yang mendapat perhatian peneliti dalam kajian politik, sosial dan kemanusiaan, dan ketertarikan ini mengakibatkan munculnya banyak definisi istilah ini, termasuk yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial atau budaya. Jika melihat kamus linguistik, kita menemukan bahwa konsep revolusi terkait dengan perubahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI; revolusi adalah: “Perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata)”<sup>(16)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> Howard, Philip and Hussain, Muzammil. (2013), Democracy's fourth wave? Digital Media and the Arab Spring, *Oxford University Press*. hlm (14-32).

<sup>(16)</sup> KBBI V Daring, pada situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revolusi>.

Dalam kamus bahasa Arab kontemporer; Revolusi sebagai istilah politik adalah “serbuan massa rakyat dengan kekerasan menuju perubahan fundamental kondisi politik dan sosial.”<sup>(17)</sup>.

Jadi, revolusi adalah perubahan radikal dalam kondisi masyarakat yang tidak diikuti oleh kondisi konstitusional, dan tujuannya adalah untuk mengubah sistem politik, sosial atau ekonomi. Oleh karena itu setiap gerakan yang mengarah pada perubahan radikal dalam masyarakat disebut sebagai revolusi, seperti: revolusi industri dan revolusi budaya, Revolusi Sosialis, dan lain-lain.

Definisi atau pengertian revolusi kontemporer dan terkini adalah perubahan total semua lembaga dan otoritas pemerintahan pada rezim sebelumnya untuk mencapai aspirasi perubahan sistem politik yang adil dan demokrasi yang memberikan hak, kebebasan, dan kebangkitan penuh bagi masyarakat. Dengan mempelajari istilah revolusi, menjadi jelas bahwa ada banyak faktor dan alasan yang menyebabkan terjadinya revolusi, ketika kondisi politik dan ekonomi memburuk, kesenjangan antar kelas meningkat, ketidakadilan merajalela di masyarakat, dan sarana untuk mengungkapkan pendapat kurang, maka massa tidak punya pilihan selain muncul secara impulsif dalam gerakan revolusioner untuk mengekspresikan pendapat mereka.

---

<sup>(17)</sup>Ahmed Omar, (2008) Kamus Bahasa Arab Kontemporer, Edisi Dunia Buku, hlm (366).

Terdapat beberapa teori tentang penyebab meletusnya revolusi. Driyakara, salah seorang filsuf Indonesia, mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor penyebab revolusi dapat menjadi penyebab munculnya revolusi. Faktor-faktor tersebut yaitu, adanya pemimpin yang cakap, adanya jumlah yang cukup mengikutinya, dan terlebih adanya (munculnya) ideologi yang pelaksanaannya dicita-citakan untuk menggantikan keadaan yang harus dijebol<sup>(18)</sup>.

Namun, tampaknya tidak satu pun dari ketiga faktor ini yang menjadi penyebab revolusi Tunisia, atau revolusi Arab yang mengikutinya, Karena revolusi Tunisia dimulai dengan peristiwa spontan ketika Bouazizi membakar dirinya sebagai protes atas penghinaannya, kemudian segera berubah menjadi revolusi rakyat besar-besaran yang tidak memiliki tujuan selain mengubah sistem yang ada dan mengekspresikan kondisi kehidupan yang buruk dan memburuknya kondisi ekonomi. Oleh karena itu, revolusi Tunisia adalah revolusi tanpa pemimpin atau pengikut, dan tidak memiliki orientasi ideologis tertentu, yang menjadikannya sebagai peristiwa unik dalam sejarah gerakan perubahan politik.

### **II.2.2 Peristiwa Revolusi Tunisia:**

Revolusi Tunisia (juga dikenal sebagai Revolusi Melati)<sup>(19)</sup> adalah rangkaian demonstrasi yang dimulai pada 17 Desember 2010 di Sidi Bouzid,

---

<sup>(18)</sup>Subkhan, (2011), Revolusi melati di Tunisia January 2011, UI, HLM (33).

<sup>(19)</sup> Penyematan istilah revolusi melati pada peristiwa yang terjadi di Tunisia merupakan suatu refleksi nasionalisme masyarakat Tunisia. Bunga Melati, dianggap sebagai bunga nasional Tunisia. Sejarah dari masuknya sepsis bunga melati di Tunisia dapat ditelusuri sejak abad ke-18. Disebutkan

setelah Mohamed Bouazizi, seorang Pemuda yang bekerja sebagai pedagang kaki lima, bunuh diri di kota Menzel Bouziane, di wilayah Sidi Bouzid, Tunisia memprotes penyitaan gerobaknya yang ia gunakan untuk menjual sayuran dan buah-buahan. Demonstrasi dilancarkan dalam solidaritas dengan Mohamed Bouazizi, Kemudian demonstrasi berbalik memprotes buruknya kondisi ekonomi dan politik, serta meluasnya pengangguran dan kemiskinan. Bouazizi meninggal pada Selasa, 4 Januari 2011, di Rumah Sakit Ben Arous, karena luka bakar yang parah<sup>(20)</sup>.

Hal ini menyebabkan pelebaran lingkaran protes dan gerakannya ke kota-kota lain, termasuk *Sfax*, *Kairouan*, *Sousse* dan *Medenine*. Demonstrasi tersebut, yang meliputi banyak kota di Tunisia, mengakibatkan kematian dan luka-luka banyak demonstran akibat bentrokan mereka dengan aparat keamanan, dan memaksa Presiden Zine El Abidine Ben Ali untuk memberhentikan sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam negeri, dan berjanji untuk mengatasi masalah yang diserukan para demonstran, dia juga mengumumkan niatnya untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2014. Dengan memburuknya situasi, Presiden Tunisia Zine El

---

bahwa bunga Melati di bawa dari Andalusia (Spanyol) menuju Tunisia dan kemudian berkembang. Melati sendiri memang merupakan simbol revolusi di Tunisia. Pergantian presiden secara damai di tahun 1987, juga dikenal sebagai revolusi melati, ini dikarenakan melati sebagai lambang nasional bagi Tunisia. Ibid, hlm (32).

<sup>(20)</sup> Seperti yang dapat diakses pada situs <https://2u.pw/fiQhQ>, diakses pada tanggal 1 April 2022.

Abidine Ben Ali melakukan beberapa reformasi, seperti: membuka situs web yang diblokir di Tunisia seperti *YouTube* setelah 5 tahun diblokir, dan harga beberapa produk makanan sedikit diturunkan. Namun pemberontakan meluas dan intensif hingga mencapai gedung-gedung pemerintah, memaksa Presiden Ben Ali untuk mundur dan meninggalkan negara itu secara tiba-tiba, di bawah perlindungan keamanan Libya, ke Arab Saudi pada hari Jumat, 14 Januari 2011<sup>(21)</sup>.

Setelah kepergian Ben Ali, Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi mengumumkan pada hari yang sama bahwa ia akan mengambil alih kursi kepresidenan untuk sementara, karena kegagalan kinerja presiden dari tugasnya, berdasarkan Pasal 56 Konstitusi, dengan deklarasi negara bagian darurat dan jam malam, tetapi Dewan Konstitusi memutuskan sehari kemudian untuk menggunakan Pasal 57 Konstitusi dan pengumuman kekosongan posisi Presiden, dan karenanya, pada hari Sabtu, 15 Januari 2011, diumumkan bahwa Ketua Parlemen Fouad Al-Mubazaa untuk sementara akan menjabat sebagai Presiden Republik sampai pemilihan presiden awal diadakan dalam jangka waktu 45 sampai 60 hari<sup>(22)</sup>.

---

<sup>(21)</sup> Seperti yang dapat diakses pada situs <https://2u.pw/INQiN>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

<sup>(22)</sup> Ibid, diakses pada tanggal 24 April 2022.

Revolusi Tunisia menjadi pemicu utama serangkaian protes dan revolusi di sejumlah negara Arab, yang kemudian disebut revolusi Musim Semi Arab.

### **II.2.3 Penyebab Revolusi Tunisia:**

Ada banyak alasan yang menyebabkan munculnya revolusi Tunisia, dan alasan terpenting terkonsentrasi pada korupsi, yang mengambil banyak dan beragam bentuk, termasuk politik, ekonomi dan sosial. Peneliti akan membahas alasan-alasan ini sebagai berikut:

1. Despotisme dan Kediktatoran: Terhalangnya cakrawala politik di Tunisia, larangan mendirikan partai politik, dan kontrol partai yang berkuasa atas tuas kekuasaan di negara itu telah menyebabkan merebaknya iklim politik yang ditandai dengan kediktatoran dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan maraknya korupsi di berbagai lembaga negara dan merebaknya ketidakadilan di masyarakat.
2. Kurangnya harapan untuk perubahan: Ketika tidak ada harapan untuk mengubah kondisi yang korup, dan korupsi yang merajalela di seluruh bagian negara, ini mungkin menjadi alasan utama bagi orang-orang untuk melakukan revolusi, karena mereka merasa tidak ada harapan untuk perubahan.
3. Kondisi ekonomi yang memburuk: dominasi orang penguasa atas komunitas keuangan dan bisnis di negara bagian Tunisia dan penimbunan

kekuasaan di tangan segelintir pengusaha yang dekat dengan otoritas, sementara tingkat kemiskinan mencapai tingkat tinggi di kalangan masyarakat Tunisia.

4. Prevalensi tingkat pengangguran di masyarakat Tunisia, di mana statistik *Wikileaks* menunjukkan tumbuhnya perasaan jijik di antara banyak orang Tunisia atas kehadiran kekayaan di tangan segelintir orang di masyarakat pada saat tingkat pengangguran mencapai 30%.
5. . Pelanggaran sistem hak asasi manusia Tunisia: Selama era Presiden Ben Ali, Tunisia menyaksikan pengadilan politik dan penyalahgunaan lawan, di samping pengenaan tahanan rumah pada beberapa aktivis politik dan pengasingan orang lain di luar negeri.
6. Rezim Tunisia tidak ada hubungannya dengan suasana jalanan dan opini publik di Tunisia dan tampak acuh tak acuh terhadap isu-isu Arab <sup>(23)</sup>.

Menurut Bapak Presiden Tunisia Ke-empat Dr. Moncef Marzuki, Faktor ekonomi adalah yang paling penting dari faktor-faktor ini, karena merupakan pendorong pertama dan utama revolusi dan simpati massa dengan protes Bouazizi. Kita dapat mengatakan bahwa penyebab dan motif revolusi laten dalam masyarakat Tunisia karena banyak faktor ekonomi, sosial dan politik, sampai insiden bunuh diri Bouazizi, yang mengobarkan api di balik

---

<sup>(23)</sup> Mohamed Sakhri, (2021), Revolusi Tunisia (2010-2011): Penyebabnya, Karakteristik dan Konsekuensinya, Aljazair *Encyclopedia of Political and Strategic Studies*, hal.(14) .



abu dan mendorong massa yang tertindas untuk melampiaskan kemarahan mereka dan mengambil tindakan. turun ke jalan untuk memprotes kondisi yang memburuk<sup>(24)</sup>. Banyak faktor internal dan eksternal yang digabungkan untuk revolusi ini menyebabkan keberhasilannya dalam mengubah pemerintah dan menjatuhkan rezim.

#### **II.2.4 Hasil Revolusi Tunisia:**

Pasca tumbangnya rezim Ben Ali terjadi berbagai dinamika politik telah terjadi di Tunisia. *The Guardian* mencatat setidaknya telah terjadi tiga kali perombakan kabinet pasca Revolusi Melati, dan juga telah terjadi dua kali pergantian Perdana Menteri.<sup>(25)</sup>

Setelah jatuhnya Ben Ali, revolusi Tunisia melewati dua fase utama:

##### 1. Fase pertama: dari 15 Januari 2011 hingga 23 Oktober 2011:

Pada hari Sabtu, 15 Januari 2011, diumumkan bahwa Ketua Parlemen Mohamed Fouad Al-Mubazaa akan mengambil alih jabatan Presiden Republik untuk sementara, sambil menunggu diadakannya pemilihan presiden awal dalam jangka waktu 45 hingga 60 hari, sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi. Pada 17 Januari, pemerintahan baru dibentuk dipimpin oleh

---

<sup>(24)</sup> Pada wawancara yang dilakukan dengan bapak Presiden Dr. Moncef Marzouki oleh peneliti pada 17 Juni-2022 di Istanbul.(14).

<sup>(25)</sup> Subkhan, (2011), Revolusi melati di Tunisia January 2011, UI, HLM (83).

Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi, dengan partisipasi sejumlah pemimpin oposisi. Ghannouchi mengumumkan bahwa pemerintah akan bekerja jauh dari partai politik. Dia juga mengumumkan bahwa pemerintah membutuhkan setidaknya enam bulan sebelum mengadakan pemilihan umum. Pemerintahannya memerintahkan pembebasan tahanan politik, pembentukan komite pencari fakta, perang melawan korupsi dan penyalahgunaan politik, dan penyelidikan pemilik kekayaan besar atau tersangka korupsi. Rakyat menggulingkan pemerintah ini dan dibentuk kembali pada 27 Januari.

Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi mengajukan pengunduran dirinya pada 27 Februari di depan saluran televisi dalam transmisi langsung. Presiden sementara Tunisia Fouad Mebazaa menunjuk pensiunan Menteri Beji Caid Essebsi selama era mantan Presiden Habib Bourguiba membentuk pemerintahan baru. Ini dibentuk dan diketuai pada 7 Maret 2011, dan terus menjalankan tugasnya sampai pemilihan diadakan pada 23 Oktober 2011.

## 2. Fase Dua: Setelah 23 Oktober 2011

Pemilihan legislatif diadakan dan koalisi yang terdiri dari Gerakan Ennahda (Islamis) dan partai Kongres Republik (kiri) memperoleh mayoritas parlemen dan pembentukan pemerintahan yang dipimpin oleh Ali Al-Arayedh (ketua partai Ennahda), dan dr. Muhammad Al-Monsef Al-Marzouki (Ketua Kongres Republik) adalah Presiden sementara Republik. Sebuah komite

pendiri juga dipilih oleh Parlemen, terdiri dari (144) anggota, dan tugasnya adalah untuk mempersiapkan konstitusi baru untuk negara<sup>(26)</sup>.

## **II.3 Definisi dan Teori mengenai Kebebasan**

### **II.3.1 Definisi konsep Kebebasan:**

Kata "kebebasan" atau kata "Bebas" sudah lama menjadi pembahasan para ahli politik, filsafat, linguistik, sosiologi, maupun agama. Istilah ini dalam bahasa Inggris "*Freedom*" atau "*Liberty*" berasal dari kata Latin "*liberates*", yang berarti "bebas". Kebebasan dianggap sebagai salah satu hak terpenting yang harus dinikmati oleh setiap manusia, karena masyarakat beradab diukur sejauh mana kebebasan rakyatnya dan kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan kehendak bebasnya tanpa paksaan. Konsep kebebasan telah menerima banyak definisi, baik dari perspektif linguistik, sosial, filosofis, politik atau bahkan agama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI V, kata "Bebas" itu artinya: Orang yang lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa) <sup>(27)</sup>. Beberapa sosiolog percaya bahwa seseorang bukanlah manusia kecuali dengan kebebasannya, kebebasan dianggap sebagai definisi

---

<sup>(26)</sup> Mohamed Sakhri, (2021), Revolusi Tunisia (2010-2011): Penyebabnya, Karakteristik dan Konsekuensinya, Aljazair *Encyclopedia of Political and Strategic Studies*, hal.(14).

<sup>(27)</sup> KBBI V Daring, pada situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebebasan>.

manusia.<sup>(28)</sup> Pendapat Hegel, kebebasan itu adalah komponen dari konsep manusia, dan kesadaran akan fakta ini tetap ada sepanjang sejarah sebagai naluri selama berabad-abad, dan naluri itu telah mencapai perubahan besar<sup>(29)</sup>.

Dalam Islam, konsep kemerdekaan (kebebasan) berasal dari keimanan yang teguh kepada tauhid dan kekuasaan Allah. Bilamana keimanan muslim ini tumbuh semakin kuat dan mendalam, dia semakin yakin akan martabatnya dan kemerdekaannya, kemauan untuk melawan penindasan dan perbudakan orang lain semakin kuat. Dalam hal ini langkah pertama yang harus ditempuh Islam adalah membebaskan manusia dari cengkeraman hawa nafsu. Manusia hanya benar-benar bebas bila ia mampu mengatur geraknya sesuai kepribadian manusiawinya<sup>(30)</sup>.

Islam telah menjamin kebebasan individu untuk berkeyakinan, sehingga ia tidak dipaksa untuk masuk agama, dan kebebasan memilih, serta kebebasan pribadi lainnya seperti kebebasan berpikir, bergerak, bekerja, memiliki dan lain-lain. Dalam pemikiran politik, kebebasan politik dianggap sebagai salah satu konsep utama dalam pemikiran politik dan karakteristik terpenting dari

---

<sup>(28)</sup> Jean-Paul Sartre, *Existentialism is a Human Doctrine*, diterjemahkan oleh Kamal Al-Hajj, Dar Al-Tali'a, (2003), hlm (177).

<sup>(29)</sup> Paris Gallimard, (1964), *Lessons in the History of Philosophy*, hlm (63).

<sup>(30)</sup> Syahid Muhammad Baqir ash-Shadar, (2002) *Keunggulan Ekonomi Islam (Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Ekonomi Islam)*, Jakarta, Pustaka Zahra, hal (118). Lihat juga: Samsul, (2008), *Konstruksi kebebasan manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam*, hlm (34).

masyarakat demokratis. Liberalisme sebagai metode didasarkan pada gagasan hukum alam, yang, seperti semua gagasan Eropa, berakar pada filsafat Yunani.

Konsep liberal tentang kebebasan di antara orang Eropa didasarkan pada kenyataan bahwa realitas dapat berubah, dan bahwa apa yang mencegahnya berubah adalah pembatasan yang dikenakan pada keefektifan hukum alam, dan bahwa mereka harus melanggar pembatasan itu sampai kenyataan berubah, dan bahwa (pembebasan) diperlukan untuk perubahan, dan ini menyebabkan pemberontakan orang Eropa dan menjatuhkan pemerintah-gereja dan hak-hak istimewa raja, bangsawan dan tuan feodal, dan untuk merobek hubungan feodal, sebagai pemutusan pembatasan ini menyebabkan penaklukan alam oleh ilmu pengetahuan, revolusi industri, dan peletakan dasar peradaban Eropa Barat kontemporer<sup>(31)</sup>.

Kebebasan politik berarti hak Rakyat memilih wakil-wakil (utusan-utusan) mereka untuk parlemen. Semua undang-undang semestinya dibahas serta diumumkan, semua pajak serta cukai semestinya ditetapkan hanya oleh satu parlemen yang dipilih oleh Rakyat itu sendiri.

Kebebasan politik berarti hak Rakyat untuk memilih sendiri semua pejabat mereka, menyelenggarakan segala macam rapat untuk membahas

---

<sup>(31)</sup> Moaz Subhi Al-Alawi, (2016), Konsep Kebebasan dalam Islam, Pusat Demokrasi Arab, hal (13).

semua urusan negara, menerbitkan surat kabar- surat kabar dan buku-buku apa saja yang mereka sukai tanpa harus minta izin apa pun. <sup>(32)</sup>.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa konsep kebebasan telah mendapat banyak definisi menurut perspektif yang melihatnya, dan perlu disebutkan bahwa konsep kebebasan adalah konsep yang relatif, karena jika kebebasan berarti seseorang bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan, kebebasan individu akan bertentangan dengan kebebasan individu orang lain, dan dengan demikian seseorang tidak akan dapat menjalani kebebasannya sepenuhnya kecuali dia memutuskan untuk tinggal di tempat terpencil yang jauh dari orang-orang. Demikianlah didirikan prinsip yang menyatakan bahwa kebebasan individu berhenti pada kebebasan orang lain.

### **II.3.2 Bentuk Kebebasan**

Kebebasan adalah nikmat yang berharga bagi individu dan masyarakat, dan itu adalah karakteristik paling khusus dari umat manusia. Beberapa filsuf bahkan menganggap kebebasan dan kemanusiaan sebagai satu hal, dan membuat hilangnya kebebasan sama dengan kehilangan nyawa.

Islam telah menjadikan kebebasan sebagai karunia ilahi, karena dalam konsepsi Islam manusia adalah penerus Tuhan di muka bumi, dan persyaratan kekhalifahan ini adalah bahwa ia menikmati kebebasannya untuk melakukan

---

<sup>(32)</sup> Samsul, (2008), Konstruksi kebebasan manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam, hlm (34).

apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Tuhan baginya.

Oleh karena itu, dia membebaskan pikiran dari tunduk pada ide atau takhayul apa pun yang dapat membatasi kebebasan manusia, sehingga dia menjadikan pengabdian seseorang murni kepada Tuhan saja, dan memberinya kebebasan bahkan untuk memilih idolanya.

Di sisi lain, Islam mengatur agar masyarakat memilih penguasa dengan kehendak bebasnya, yang dikenal dengan konsep Syura dalam politik Islam. Kebebasan ini memiliki manifestasi, baik pada tingkat individu, politik, sosial atau ekonomi, dan berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis tersebut.

#### **II.3.2.1 *Kebebasan individu:***

Terdapat hak-hak materiil dan moral yang harus diperoleh setiap manusia berdasarkan kodrat kemanusiaannya dan keyakinannya sebagai manusia, asalkan kebebasan pribadinya tidak bertentangan dengan kebebasan orang lain, seperti kebebasan hidup, kebebasan berpikir dan beribadah, kebebasan memiliki, bergerak, jual beli, dan lain-lain.

Kebebasan pribadi dikaitkan dengan hak-hak yang diperoleh seseorang berdasarkan kelahirannya, yaitu:

1. Hak untuk hidup: artinya setiap manusia memiliki kebebasan untuk hidup dengan aman tanpa bahaya yang mengancam hidupnya, karena hidup adalah prasyarat yang menjamin individu untuk memperoleh sisa haknya.
2. Hak atas kebebasan: Segera setelah ia lahir, seseorang berhak untuk bebas, yaitu, tidak diperbudak, dan ia tidak ditangkap atau dipenjarakan tanpa bukti dan tanpa pengadilan yang adil dan tidak memihak, dan bahwa ia dijamin kumpulan kebebasan berikut:
  - i. Kebebasan berpikir dan berekspresi: Ini adalah salah satu kebebasan dasar yang terkait dengan kebebasan manusia. dalam membentuk pendapat tentang masalah tertentu, bahkan jika pendapat ini tidak dapat diterima. Jenis ini Kebebasan berkaitan dengan kebebasan berpikir, dan berbagai cara, baik dalam menulis, berbicara, atau selama demonstrasi.
  - ii. Hak atas kesetaraan: Artinya semua manusia memiliki hak yang sama, bahwa manusia dilahirkan sama tanpa membedakan agama, bahasa, ras, dan kepercayaannya, dan hak ini dibuktikan melalui undang-undang yang menyerukan non-diskriminasi dalam hak dan tugas.
  - iii. Kebebasan berorganisasi: Ini berarti kebebasan seseorang untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu, seperti milik suatu partai.



- iv. Kebebasan bergerak: Kebebasan ini menjamin hak individu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga tidak ada pembatasan gerak manusia kecuali atas perintah pengadilan.
- v. Kebebasan bekerja: Kebebasan ini berkaitan dengan hak asasi manusia untuk memilih profesi dan tempat kerja, selama ini pekerjaan tidak bertentangan dengan hukum. <sup>(33)</sup>.

### **II.3.2.2 Kebebasan Sosial:**

Kebebasan sosial berarti kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dan dalam transparansi penuh. Adalah hak orang untuk bertemu satu sama lain untuk kepentingan bersama di antara mereka sendiri. Ini juga berarti bahwa orang dapat bergabung dengan siapa pun yang mereka inginkan, dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk bergabung dengan kelompok mana pun tanpa kehendaknya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang cukup untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, terutama dalam hal makanan, pakaian, perumahan, perawatan medis dan pelayanan sosial yang diperlukan. berhak atas jaminan dalam hal menganggur, sakit, cacat atau menajanda atau lanjut

---

<sup>(33)</sup> Alaa Bakr, *Doctrines of Thought in Al-Mizan*, Dar Al-Aqidah, Kairo, hlm (143). Lihat juga: Raafat Rayan, 2015, *Revolusi Arab 2011 dan dampaknya terhadap konsep kebebasan dan partisipasi politik di kalangan mahasiswa Palestina di Tepi Barat (Universitas Nasional An-Najah sebagai model)*, UNA.

usia atau keadaan lain di luar kendalinya dan yang membuatnya kehilangan mata pencaharian<sup>(34)</sup>.

Ia juga berhak atas pendidikan, menyatakan pendapatnya, kebebasan beracara menurut aturan peradilan yang tidak memihak, dan semua kebebasan beragama dan intelektual.

Kebebasan individu mengganggu kebebasan masyarakat dalam satu atau lain cara, karena kebebasan manusia bukanlah kebebasan sejati kecuali jika memperhitungkan komitmen terhadap tugas-tugas sosial, yaitu kebebasan orang lain, dan oleh karena itu kebebasan sosial didasarkan pada kesesuaian dari keinginan individu dan masyarakat.

### **II.3.2.3 Kebebasan Politik:**

Kebebasan politik didefinisikan sebagai kebebasan individu untuk menjalankan perilaku politiknya atas kehendak bebasnya sendiri tanpa batasan atau paksaan.

Dimana individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik sebagai calon atau sebagai pemilih yang memilih wakilnya secara bebas, serta untuk bergabung atau mendirikan salah satu partai politik dan kelompok, dan untuk menyatakan pendapatnya tentang semua masalah politik dan

---

<sup>(34)</sup> Seperti yang dapat diakses pada situs <https://2u.pw/CKNLD>, diakses pada tanggal 10 May 2022.

masalah sepenuhnya bebas, di samping semua praktik publik dan partisipasi dalam berbagai badan dan asosiasi.

Dalam sistem kapitalis, seorang individu memiliki kebebasan politik, dan pendapatnya dihormati. Maka setiap individu secara wajar memiliki hak bersuara dan berpartisipasi dalam pengaturan dan pembentukan pemerintahan<sup>(35)</sup>. Menurut Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948, semua pihak di dunia hendaklah menghormati 30 pasalnya. Di antaranya Pasal 20 & 21, memberikan hak berkumpul secara aman dan menumbuhkan persatuan atau kesatuan serta mengambil perhatian dalam proses pemerintahan, terutamanya dalam proses membuat keputusan mengenai dasar-dasar Negara<sup>(36)</sup>.

Perasaan kebebasan politik individu dan kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan cara damai mengurangi kekerasan dan mencegah bentrokan, karena masyarakat biasanya tidak menggunakan protes kekerasan kecuali jalan untuk mengekspresikan pendapat secara damai tertutup bagi mereka. kebebasan yang tersedia, semakin rendah risiko revolusi.

---

<sup>(35)</sup> Syahid Muhammad Baqir ash-Shadar, (2002) Keunggulan Ekonomi Islam (Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Kerangka Pemikiran Ekonomi Islam), Jakarta, Pustaka Zahra, hal (58).

<sup>(36)</sup> Seperti yang dapat diakses pada situs <https://2u.pw/CKNLD>, diakses pada tanggal 10 May 2022.

### **II.3.2.4 Kebebasan Ekonomi:**

Kebebasan ekonomi berarti bahwa anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk mempraktikkan prosedur ekonomi dengan kebebasan penuh, dan tidak memaksakan pembatasan apa pun pada operasi perdagangan, murabahah, jual beli, dan untuk melindungi hak individu untuk memiliki properti dan untuk menyimpulkan. kontrak.

Pandangan pasar bebas liberal mendefinisikan "kebebasan ekonomi" sebagai kebebasan untuk memproduksi, mengonsumsi, atau memperdagangkan barang atau jasa yang diperoleh tanpa menggunakan kekerasan, penipuan, atau pencurian. Hal ini diwujudkan dalam supremasi hukum, hak milik dan kebebasan berkontrak. Kebebasan ekonomi ditandai dengan keterbukaan pasar eksternal dan internal, perlindungan hak milik dan kebebasan inisiatif ekonomi<sup>(37)</sup>. Di antara persyaratan kebebasan ekonomi adalah pemberian hak atas properti kepada individu sehingga individu yakin bahwa uang mereka tidak akan meninggalkan milik mereka tanpa persetujuan mereka, dan bahwa hukum menjamin pengaturan hak milik individu untuk semua secara setara. Ini juga merupakan persyaratan kebebasan ekonomi serta memberikan kebebasan berkontrak bagi semua orang sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang, dan kebebasan berkontrak adalah hak untuk

---

<sup>(37)</sup> Surjit S. Bhalla, (1997), *Kebebasan dan pertumbuhan ekonomi: siklus yang baik?.* Diterbitkan dalam *Democracy's Victory and Crisis.* Cambridge University Press. hlm (205).

memilih seseorang bagi pihak-pihak yang ingin dia kontrak dan berdagang dengannya. syarat dan ketentuan apa pun yang dianggapnya tepat dengan cara yang tidak melanggar hukum negara. Kebebasan ekonomi merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap negara untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan maju.

## **II.4 Definisi dan Teori mengenai Partisipasi Politik**

### **II.4.1 Definisi Konsep Partisipasi Politik**

Konsep partisipasi politik merupakan salah satu konsep yang mendapat perhatian luas dari para pemikir dan peneliti di bidang ilmu politik dan sosial, karena partisipasi politik merupakan salah satu wujud dasar masyarakat demokratis, dan tidak dapat dibayangkan akan ada masyarakat atau negara demokratis yang anggotanya tidak menikmati partisipasi politik dalam berbagai bentuknya, baik melalui lembaga, kelompok, dan partai politik atau melalui partisipasi individu orang-orang.

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik

negara<sup>(38)</sup>. Konsep partisipasi politik didasarkan pada dasar yang jelas dan spesifik, yaitu masuknya warga negara biasa atas kehendak bebasnya sendiri dan ke dalam aktivitas sosial kolektif di mana kepentingan individu tumpang tindih dengan kepentingan kelompok sampai pada suatu titik. di mana menjadi sulit untuk memisahkan kepentingan-kepentingan ini, bahkan jika intensitasnya bervariasi sesuai dengan situasi atau masyarakat tertentu.

Menurut Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*containing*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya<sup>(39)</sup>.

Sebagian besar ilmuan politik sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik itu adalah bagaimana

---

<sup>(38)</sup> Suharno, (2004), Diktat Kuliah Sosiologi Politik, Yogyakarta, hlm (102-103).

<sup>(39)</sup> Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm (367).

keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan utama daripada kegiatan-kegiatan politik ini adalah untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah<sup>(40)</sup>. Partisipasi politik juga didefinisikan sebagai partisipasi formal dan informal individu dan kelompok dalam semua kegiatan ekonomi, politik dan sosial masyarakat dengan tujuan mencapai kebaikan bersama.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson Partisipasi politik itu adalah aktivitas warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif<sup>(41)</sup>.

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik dalam arti prosedural adalah partisipasi anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik dengan memilih penguasa atau memantaunya dan memantau kinerja otoritas eksekutif, serta berinteraksi dengan peristiwa politik secara positif

---

<sup>(40)</sup> Sitepu. 2012. Penulisan Buku Teks Pelajaran, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, hlm (92).

<sup>(41)</sup> Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, *Political Participation in Developing Countries* Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977, hlm (3).

dan negatif, dan partisipasi ini mungkin spontan individu atau terorganisir melalui lembaga dan entitas. Tingkat partisipasi itu sendiri bervariasi dalam hal tingkat interaksi dan keseriusan, seperti yang akan dijelaskan nanti.

#### **II.4.2 Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang melihat bahwa partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dibagi menjadi dua bagian yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif, dan berikut ini adalah pengertian dari masing-masingnya:

##### **1. Partisipasi Aktif:**

Ini termasuk partisipasi dalam memilih pemerintah dan meminta pertanggungjawaban, menyajikan proposal alternatif untuk kebijakan pemerintah, di samping berinteraksi dengan kebijakan publik dalam semua masalah internal dan eksternal.

##### **2. Partisipasi Pasif:**

Ini terdiri dari mematuhi keputusan pemerintah dan melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh mereka tanpa



partisipasi dalam mengubah situasi yang ada atau mengungkapkan pendapat terhadapnya<sup>(42)</sup>.

Menurut Abrash, Ibrahim, bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi dalam tiga tingkatan:<sup>(43)</sup>

### **I. Partisipasi terorganisir:**

Ini terjadi dalam kerangka lembaga atau organisasi yang ada, yang merupakan penghubung antara warga negara dan sistem politik, melalui organ yang melaksanakan tugas mengumpulkan dan mengintegrasikan tuntutan individu yang diungkapkan dan mengubahnya menjadi politik umum. pilihan, dalam kerangka program khusus yang dilakukan oleh partai politik dan serikat pekerja Federasi profesional, dewan terpilih.

### **II. Partisipasi mandiri:**

Partisipasi mandiri dilakukan oleh warga negara secara individu, sehingga ia memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan jenis dan derajat keikutsertaannya, serta bebas untuk berpartisipasi atau tidak.

---

<sup>(42)</sup> Sastroatmodjo, (1995) Partisipasi politik, *IKIP Semarang Press*, hlm (89-91).

<sup>(43)</sup> Abrash, Ibrahim (1998), *Sosiologi Politik*, Amman (Yordania): Dar Al-Shorouk untuk Penerbitan dan Distribusi, hlm.: 137-138.)

### III. Partisipasi situasional:

Ini terjadi pada kesempatan dan termasuk yang tidak aktif dan tidak dibingkai secara politik oleh publik, yaitu masyarakat umum. Manifestasinya dimanifestasikan dalam pemungutan suara dalam pemilihan umum dan dalam referendum.

Di sisi lain *Huntington* dan *Nelson*<sup>(44)</sup>: mengklasifikasi partisipasi politik dalam empat bentuk Seperti berikut:

Pertama: kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.

Kedua: *lobbying* yang mencakup upaya –upaya baik perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat– pejabat pemerintah ataupun pimpinan – pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan – keputusan yang akan di ambil.

Ketiga: kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

---

<sup>(44)</sup> Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, *Political Participation in Developing Countries* Cambridge, Mass: *Harvard University Press*, 1977, hlm (16-17).

Keempat: mencari koneksi (*contacting*) yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat – pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya seorang atau berapa orang<sup>(45)</sup>.

### **II.4.3 Fungsi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat demokrasi, sehingga sulit dibayangkan adanya masyarakat demokratis yang sebagian besar tidak mempraktikkan partisipasi politik kecuali sebatas partisipasi pasif, yang terbatas pada menaati perintah dan keputusan saja.

Menurut *Robert Lane*<sup>(46)</sup> (1990: 181-182), partisipasi politik menjalankan empat fungsi dasar:

- A. sebagai sarana mengejar kebutuhan ekonomi.
- B. sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian sosial.
- C. sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai sendiri.
- D. sebagai sarana untuk mencapai memenuhi keutuhan atas kebutuhan psikologis.

---

<sup>(45)</sup> Tajudin, Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, UNPAM, hlm (7).

<sup>(46)</sup> Robert Lane (1990), Michael -Rush dan Phillip Althoff, hlm (181-182).

Partisipasi politik dianggap memberikan kredibilitas dan legitimasi rezim dan lembaga pemerintah, dan Demokrasi dengan mendedikasikan hak warga negara untuk menyatakan pendapatnya tentang isu-isu nasional, dan tidak memonopoli tindakan nasional untuk kepentingan kelompok tertentu yang memberikan dirinya hak untuk gerakan politik.

#### **II.4.4 Tingkatan Partisipasi Politik**

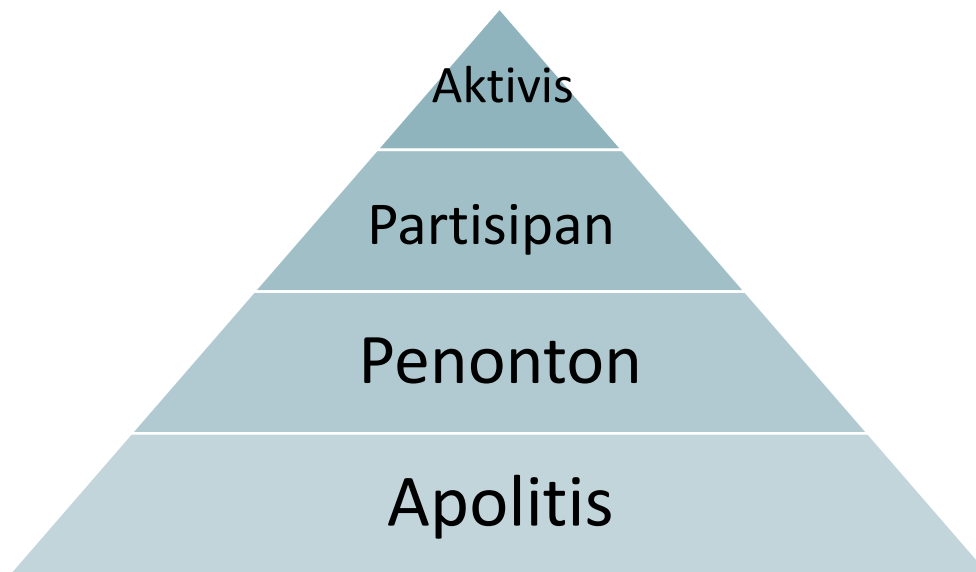
Tingkat partisipasi politik antara individu dan masyarakat bervariasi sesuai dengan sifat dan budaya masyarakat dan sejauh mana kesadaran politik berakar di dalamnya. Kami mencatat bahwa tingkat partisipasi politik dalam masyarakat demokratis lebih dari rekan-rekan mereka di non-demokrasi masyarakat. Tingkat partisipasi politik dalam masyarakat masing-masing bervariasi.

Menurut *David F Roth* dan *Frank L. Wilson*, tingkatan partisipasi masyarakat terbagi dalam empat kategori yaitu: Aktivistis, Partisipan, Penonton, dan Apolitis<sup>(47)</sup>.

---

<sup>(47)</sup> David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam ed. ke-2, (*Boston: Houghton Mifflin Company*, (1976), hlm (159).

**Gambar II.1 Piramida Partisipasi Politik**



Sumber: *David F.Roth dan Frank L. Wilson*

A. Aktivis: Pejabat umum; seperti pimpinan kelompok kepentingan atau pejabat parpol sepenuh waktu; Menyimpang; (Seperti orang pembunuh dengan maksud politik, teroris dan pembajak).

B. Partisipan: Orang yang bekerja untuk kampanye; Yang aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan atau aktif dalam proyek sosial.

C. Penonton: Orang yang menghadiri rapat umum; Yang aktif dalam kelompok kepentingan; Memberikan suaranya dalam pemilu; Orang yang tertarik dengan diskusi politik.

D. Apolitis: Orang yang tidak peduli dengan partisipasi politik.

## **II.4.5 Partisipasi Politik dalam revolusi Tunisia**

Tidak diragukan lagi, tekanan menghasilkan ledakan, dan orang-orang yang tertindas dapat bersabar dengan penindasan kebebasan mereka dan dirampok martabat mereka untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak dapat bersabar dengan itu sampai akhir zaman, dan bahwa api tetap laten di bawah gunung berapi, bahkan jika permukaannya tampak tidak aktif sampai saat ledakan tiba.

Selama beberapa dekade, partisipasi pria dan wanita Tunisia dalam partai politik dan asosiasi sipil sangat terbatas karena pembatasan keamanan dan penganiayaan yang dipraktikkan pada partai dan kelompok ini, dan ketika masyarakat membatasi ekspresi pendapat secara damai, ekspresi kekerasan tidak dapat dihindari. Hasil dalam banyak kasus.

Tamparan di wajah pemuda, Mohamed Bouazizi, adalah percikan yang mengobarkan hati rakyat Tunisia dan mendorong kemarahan yang panik ke jalan-jalan. Massa yang marah bergegas untuk mengecam praktik keamanan, pembatasan kebebasan, perampokan hak, dan situasi ekonomi yang lemah.

Mungkin yang paling mencolok tentang revolusi Tunisia adalah bahwa itu adalah revolusi tanpa pemimpin, dan tidak direncanakan sebelumnya, juga tidak memiliki orientasi ideologis

yang diarahkan, tetapi merupakan peristiwa spontan-spontan yang dihasilkan dari solidaritas massa dengan Bouazizi muda yang dihina sampai dia memutuskan untuk menyingkirkan nyawanya. Inilah yang membuat revolusi Tunisia unik di antara revolusi dan membutuhkan studi ilmiah yang lebih serius.

Partisipasi politik rakyat Tunisia dicirikan oleh banyak ciri, yang paling penting adalah:

- A. Damai: Mungkin ciri yang paling menonjol dari revolusi Tunisia adalah kedamaiannya, baik pada tataran slogan maupun pada tataran praktik. Tidak heran jika salah satu nyanyian dan slogan revolusi Tunisia adalah “damai”, yang berarti tenang<sup>(48)</sup>.
- B. Partisipasi perempuan yang bersifat aktif: Selama revolusi Tunisia, partisipasi perempuan tampak luar biasa, berbeda dengan stereotip yang umumnya berlaku tentang lemahnya partisipasi politik perempuan dalam peristiwa-peristiwa besar<sup>(49)</sup>.
- C. Partisipasi pemuda yang bersifat aktif: Pemuda berada di jantung Revolusi Melati, karena mereka memikul beban tinggal di alun-alun dan menyebarkan seruan untuk berpartisipasi dalam revolusi

---

<sup>(48)</sup> Muhammad Al-Shuyoukh, (2012) Bentuk-Bentuk Revolusi Arab (Kasar dan Lembut Sebagai Model) Pers Timur Tengah, hlm (2).

<sup>(49)</sup> (Amani Al-Taweel, (2013), Tantangan Partisipasi Politik Perempuan, Jurnal Demokrasi, hlm (151).

dan berdemonstrasi melalui platform media sosial, karena mereka adalah bahan bakar nyata untuk pengapian revolusi dan terus meradang sampai jatuhnya rezim.

Revolusi Tunisia menyaksikan kohesi antara semua spektrum masyarakat yang melampaui perbedaan ideologis, agama dan partisan di antara mereka sendiri dan bersatu dalam revolusi pada satu tujuan, yaitu menggulingkan rezim dan mendirikan negara demokrasi modern.